

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lubis, M. solly, 1994, *Filsafat ilmu dan penelitian*, Bandar Maju, Bandung
- Pugung, Solahudin. 2021, *Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*, Deepublish, Yogyakarta
- Marigan Masry Simbolan, 2004, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim, H, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Salim H.S, Nurbani, Erlis Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk kesatu*, Rajawali Press, Jakarta
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenada Media Group, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Sianturi, Purnama Tiorja, 2013, *Perlindungan hukum terhadap pembeli barang jaminan tidak bergerak melalui lelang*, Mandar Maju, Bandung
- Sihombing, 2019, *Sistem Hukum PPAT Dalam Hukum Tanah Indonesia Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta
- Soerjowinoto, Petrus, 2018, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Garuda Mas Sejahtera, Jawa Timur
- Suteki, Taufani Galang, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum filsafat, teori dan praktik*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Urip Santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Usman, Sabian, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

Wahyu Utomo, Hatta Isnaini, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah edisi pertama*, Kencana, Jakarta

B. Jurnal

Agita Chici Rosdiana, Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Jatiswara*, Vol.37 (No.1), 2022

Ananda Muhammad Risqullah, Peran Notaris Cegah Transaksi Ilegal Melalui GOAML, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, (No.6), 2022

Annisa Nur Azizah, Liza Priandhini, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap pihak yang memberikan keterangan palsu, *Jurnal Ilmu Hukum (Legal Standing)*, Vol. 7, (No.1), 2023

Arsiendy Aulia, Prinsip Kehati-Hatian PPAT Dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Perwujudan Kepastian Hukum, *Recital Review*, Vol.4, (No.1), 2022

Ansori, Gatot Subroto, Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, *Unira Law Journal*, Vol.1, (No.1), 2022

Berti Nova Khalifa Bazar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban PPAT, *Notarius*, Vol.14, (No.1), 2021

Bisman Gaurifa, Pertanggungjawaban Pidana PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah, *Jurnal Panah Hukum*, Vol.1, (No.1), 2022

Cecyllia Tamara B.Schouten, Hanafi Tanawijaya, Perbuatan Maladministrasidalam Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Ppat Dan Akibat Hukumnya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Ppat Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Ppat(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 129/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1, (No.1), 2018

Cindy Oktaviany, Muhammad Hadin Muhjad, Diana Haiti, Asas Mengenali Pengguna Jasa Notaris Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, *Jurnal Banua Law Review*, Vol.4, (No.1), 2022

Daniella Herera Yosifany Hutagalung, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jatiswara*, Vol.35, (No.1), 2020

Dedy Mulyana, Rika Kurniasari Abdughani, Tanggungjawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum, *Juris and Society Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol.1, (No.1), 2021

- Della Destafri Kuseri, Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dalam Melacak Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan, *Lex Crimen*, Vol.4, (No.4), 2015
- Eka Marwahyuni Wira, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap PPAT dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah di Kota Payakumbuh, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 2, (No.3), 2020
- Eliya Al-Afrida Siska, Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Diera Digital Melalui Aplikasi Go Anti Money Laundering (GoAML), *Jurnal Hukum To-ra*, Vol.8, (No.3), 2022
- Erdhyana Afifah Salsabila, Pujiyono, Arief Suryono, Urgensi Larangan Freelancer Notaris dan PPAT Sebagai Upaya Preventif Terhadap Perlindungan Jabatan Notaris dan PPAT, *Jurnal Colas*, Vol. 4, (No. 1), 2023
- Erma Denniagi, Analisis ke-ekonomian pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, *Lex Renaissan*, Vol.6, (No.2), 2021
- Fatria Hikmatiar Al Qindy, Tanggungjawab Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.4, (No.2), 2023
- I Gusti Bagus Yoga Prawira, Tanggungjawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah, *Jurnal IUS*, Vol. 4, (No.1), 2016
- Kadek Cahya Susila Wibawa, Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab PPAT dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, (No. 1), 2019
- Karuniawan Nurahmansyah, Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Akta PPAT, *Hukmy Jurnal Hukum*, Vol.1, (No.2), 2021
- Khairul, Mahmul Siregar, Marlina, Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Mercatoria*, Vol.4, (No.1), 2011
- Lidya Christina Wardhani, Tanggungjawab Notaris/PPAT Terhadap Akta yang Dibatalkan Oleh Pengadilan, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.2, (No.1), 2017
- Made Riyaldi, Bambang Winarno, Abdul Rachmad Budiono, Urgensi Pengaturan Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya*, Vol.1, (No.1), 2014
- Miftahul Huda, Ani Suhaini, Kewenangan Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh PPAT

- Dalam Melaksanakan Jabatannya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 20, (No.2), 2023
- M.Afit Syahputra, R Ismala Dewi, Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Mengikutsertakan Seluruh Ahli Waris Sebagai Para Pihak, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol.8, (No.3), 2022
- Muhammad Bintang Naufaldy, Gandjar Laksmiana Bonaparta, Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Unes Law Review*, Vol.6, (No.2), 2023
- Muammar Khadafi, Iskandar Muda, Irwan Santoso, Implementasi hukum prinsip mengenali pengguna jasa dilaksanakan Notaris terhadap pelaporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GOAML berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 3 tahun 2021, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol.2, (No.9), 2023
- Muhammad Raditya Pratama Ibrahim, Amad Sudiro, Kewenangan dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Vol.51, (No.2), 2022
- Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al Razi*, Vol.18, (No.2), 2018
- Nuriska Sukma Anjani Putri, Sri Yanthy Yosepha, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Di Kantor Notaris dan PPAT, *Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen*, Vol.2, (No.2), 2022
- Noor Atikah, Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia, *Notary Law Journal*, Vol. 1, (No.3), 2022
- Putu Arya Bagus Utama, I Nyoman Sumardika, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Dihadapan PPAT, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, (No.1), 2021
- Rachmawati, Pelaksanaan Kewajiban PPAT setelah melakukan sumpah jabatan, *Jurnal Petitum*, Vol.10, (No.2), 2022
- Raihana, Tri Endang Kumala Sari, Fanny, Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi, *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, Vol.2, (No.3), 2023
- Raisa Maria Sapulete, Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang anti pencucian uang, *Lex Et Societatis*, Vol.1, (No.2), 2013
- Ratih Mega Puspa Sari, Sidik Purnama, Gunarto, Peranan PPAT dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli, *Jurnal Akta*, Vol.5, (No.1), 2018

- Reynaldi Putra Rosihan, Analisis Yuridis Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pasal 3 huruf (b) PP RI Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.20, (No.1), 2020
- Ridho Ilham, Elwi Danil, Yoserwan, Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Swara Justisia*, Vol.3, (No.4), 2020
- Rina Dewi Sartika Siahaan, Muhsin Lambok Ilvira, “Pertanggungjawaban Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GoAML dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang”, *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum*, Vol.1, (No.2), 2023
- Ronal Ravianto, Amin Purnawan, Peran PPAT dalam Pemungutan BPHTB dengan Pendekatan Self Assesment System, *Jurnal Akta*, Vol. 4, (No.4), 2017
- Shalahuddin Suriadiredja, Mohamad Fajri Mekka Putra, Penunjukkan Notaris Sebagai Pihak Pelapor dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8, (No.1), 2022
- Suci Ananda Badu, Tugas dan Kewenangan PPAT dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol.5, (No.6), 2017
- Taufan Setia Prawira, Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik POLRI, *Syntax Literate*, Vol.7, (No.5), 2022
- Terry Maharani Wibowo, Pembinaan dan Pengawasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Terhadap PPAT dan PPATS, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.2, (No.2), 2018
- Toetik Rahayuningsih, Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia, *Jurnal Yuridika*, Vol.28, (No.3), 2013
- Vera Sartika, Moh Saleh, Dampak hukum terhadap PPAT yang tidak melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 31, (No. 4), 2023
- Vivian Lora, Bastari Mathon, Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, *Jurnal Mercatoria*, Vol.14, (No.1), 2021

- Yoyon Mulyana Darusman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dan Sebagai PPAT, *Jurnal Hukum Adil*, Vol.7, (No.1), 2016
- Yulia Syanu Citra Pertiwi, Fendi Setyawan, Firman Floranta Adonara, Autentikasi Akta PPAT yang Pengesahan Aktanya Tidak Sesuai Pada Saat Penandatanganan Para Pihak Dihadapan PPAT, *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol.5, (No.2), 2021
- Yuni Priskila Ginting, Astrid Athina Indradewi, Transaksi Keuangan Mencurigakan Dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol.7, (No.2), 2021
- Zhafira Aulia Rahmi, R.Imam Rahmat Sjafi'I, Kewajiban PPAT Dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.4, (No.1), 2019

C. Tesis

- Eliya Al-Afrida Siska, (2022), Peran Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Era Digital Melalui Aplikasi *Go Anti Money Laundering (GOAML)*, Universitas Gajah Mada
- Miranda Damayanti, (2023), *Peran PPAT Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Diponegoro

D. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan No.3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang
penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Pejabat Pembuat
Akta Tanah

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah